



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGAM BINTORO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 264652

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 513.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/50 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 259 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 2800 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 39.200.000
5. Tanah Seluas 2085 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 41.700.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 692 m2/200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 207.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 150.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA STARLET SEDAN Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, HONDA WIN Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 477.053.206

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.140.553.206

III. HUTANG

Rp. 239.143.200

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 901.410.006

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.